



Analisis Kebijakan Dinas Pendidikan Tentang Tunjangan Khusus dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di SMP Negeri Kecamatan Teor

Tamaji¹, Theresia Laurens², Lambertus Lokollo³

^{1,2,3}Universitas Pattimura, Indonesia

E-mail: tarmaji01@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-02-07 Revised: 2025-03-23 Published: 2025-04-09	<p>This study aims to evaluate the impact of the Education Office's policies on improving the quality of education at SMP Negeri Kecamatan Teor. The research materials include policy documents, questionnaires, and interview recording devices. The research sample consists of the secretary of the Education Office, five public school teachers receiving special allowances, and the head of the cultural department. A descriptive qualitative method was used with interview, observation, and document analysis techniques. The parameters measured include policy effectiveness, teacher motivation, education quality, and implementation barriers. The analysis results indicate that the special allowance policy improves teacher welfare and motivation but is hindered by administrative delays and infrastructure. Scholarship and training programs enhance teacher competence, though access is limited. The provision of learning facilities and infrastructure improvements also show mixed results, with distribution issues and resource limitations. Supporting factors for policy success include the commitment of the education office, community support, and competent human resources. Hindering factors include infrastructure limitations, administrative delays, and minimal training. This study highlights the importance of improving policy implementation, enhancing infrastructure, and efficient administration to achieve optimal results. Local community support and policy adaptation to specific regional needs are also crucial. By improving policy implementation and overcoming existing obstacles, the quality of education in Kecamatan Teor can be significantly enhanced, positively impacting student learning outcomes and community welfare.</p>
Keywords: <i>Education Policy;</i> <i>Special Allowance;</i> <i>Education Quality;</i> <i>Education Infrastructure.</i>	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-02-07 Direvisi: 2025-03-23 Dipublikasi: 2025-04-09	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kebijakan Dinas Pendidikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SMP Negeri Kecamatan Teor. Material penelitian mencakup dokumen kebijakan, kuesioner, dan alat perekam wawancara. Sampel penelitian terdiri dari sekretaris Dinas Pendidikan, lima guru PNS penerima tunjangan khusus, dan kepala bidang kebudayaan. Metode kualitatif deskriptif digunakan dengan teknik wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Parameter yang diukur meliputi efektivitas kebijakan, motivasi guru, kualitas pendidikan, dan hambatan implementasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan tunjangan khusus meningkatkan kesejahteraan dan motivasi guru, namun terkendala keterlambatan administrasi dan infrastruktur. Program beasiswa dan pelatihan meningkatkan kompetensi guru, meski akses terbatas. Penyediaan fasilitas belajar dan perbaikan infrastruktur juga menunjukkan hasil beragam, dengan masalah distribusi dan keterbatasan sumber daya. Faktor pendukung keberhasilan kebijakan meliputi komitmen dinas pendidikan, dukungan masyarakat, dan SDM berkompeten. Faktor penghambat meliputi keterbatasan infrastruktur, keterlambatan administrasi, dan minimnya pelatihan. Penelitian ini menyoroti pentingnya perbaikan implementasi kebijakan, peningkatan infrastruktur, dan administrasi yang efisien untuk mencapai hasil yang optimal. Dukungan komunitas lokal dan adaptasi kebijakan terhadap kebutuhan spesifik daerah juga sangat penting. Dengan memperbaiki implementasi kebijakan dan mengatasi kendala yang ada, kualitas pendidikan di Kecamatan Teor dapat ditingkatkan secara signifikan, berdampak positif pada hasil belajar siswa dan kesejahteraan masyarakat.</p>
Kata kunci: <i>Pendidikan;</i> <i>Tunjangan Khusus;</i> <i>Kualitas Pendidikan;</i> <i>Infrastruktur Pendidikan.</i>	

I. PENDAHULUAN

Pendidikan memainkan peran strategis dalam pembentukan bangsa, karena melibatkan transfer nilai-nilai luhur dan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pendidikan

di Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku, menghadapi tantangan dalam hal kesenjangan kualitas pendidikan. Beberapa sekolah di daerah ini kekurangan tenaga pendidik dan sarana prasarana yang memadai,

yang berdampak negatif pada proses pembelajaran dan kualitas pendidikan. Kesenjangan ini menjadi lebih nyata di Kecamatan Teor, di mana minimnya jumlah guru, fasilitas yang tidak memadai, serta kurangnya dukungan infrastruktur seperti transportasi dan komunikasi memperburuk kondisi pendidikan. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai, yang saat ini masih menjadi tantangan besar di daerah-daerah terpencil di Indonesia (Juharyanto et al., 2023).

Kebijakan yang ada sering kali tidak diimplementasikan secara efektif, sehingga tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah ini. Keterlambatan pencairan tunjangan, kurangnya pelatihan guru, dan infrastruktur yang tidak memadai adalah beberapa faktor penghambat utama yang diidentifikasi dalam penelitian terkait implementasi kebijakan pendidikan di daerah terpencil di Indonesia (Sibarani & Sinamo, 2020). Untuk mengatasi kesenjangan ini, diperlukan perbaikan signifikan dalam berbagai aspek pendidikan di daerah terpencil seperti Kecamatan Teor. Perbaikan sistem administrasi untuk memastikan pencairan tunjangan tepat waktu, peningkatan akses transportasi dan jaringan internet, serta penyediaan fasilitas belajar yang memadai sangat penting untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pendidikan. Selain itu, pengembangan profesional guru melalui program pelatihan yang berkelanjutan dan inklusif dapat membantu meningkatkan kompetensi guru dan kualitas pengajaran di kelas (Cahyadi et al., 2021).

Kecamatan Teor, sebagai salah satu kecamatan terpencil di Kabupaten Seram Bagian Timur, menghadapi berbagai masalah yang menghambat peningkatan kualitas pendidikan. Minimnya jumlah guru, fasilitas yang tidak memadai, serta kurangnya dukungan infrastruktur seperti transportasi dan komunikasi, merupakan beberapa faktor yang memperburuk kondisi pendidikan di daerah ini. Misalnya, di SMP Negeri Kecamatan Teor, terdapat kekurangan guru bersertifikasi dan sarana prasarana yang layak, yang berdampak pada rendahnya minat belajar siswa. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan perlu mengimplementasikan kebijakan yang tepat. Kebijakan seperti pemberian tunjangan khusus bagi guru yang bertugas di daerah terpencil, penyediaan fasilitas belajar yang memadai, dan perbaikan infrastruktur

transportasi dan komunikasi, diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja guru, serta kualitas pendidikan secara keseluruhan. Selain itu, dukungan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya juga sangat penting dalam mengimplementasikan kebijakan ini secara efektif. Penelitian menunjukkan bahwa perbaikan infrastruktur dan dukungan komunitas sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil (Ledger et al., 2021; Muthanna & Sang, 2023).

Pemberian tunjangan khusus bagi guru yang bertugas di daerah terpencil telah diakui sebagai salah satu solusi efektif dalam literatur ilmiah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Tunjangan khusus dapat meningkatkan kesejahteraan guru, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja dan motivasi mereka dalam mengajar (Chirimba et al., 2023). Selain itu, dukungan infrastruktur seperti transportasi dan komunikasi juga penting untuk mendukung mobilitas guru dan aksesibilitas sumber belajar. Kebijakan pendidikan harus melalui proses yang sistematis, mulai dari perumusan masalah hingga implementasi dan evaluasi. Kebijakan yang baik harus didukung oleh data yang akurat dan analisis yang mendalam mengenai kondisi lapangan. Dalam konteks Kecamatan Teor, kebijakan tunjangan khusus harus didasarkan pada kebutuhan nyata dan kondisi spesifik daerah ini. Selain itu, implementasi kebijakan harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan masyarakat setempat. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemberian tunjangan berbasis kinerja di daerah terpencil Indonesia dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan keterlibatan orang tua dalam pendidikan (Gaduh et al., 2020). Selanjutnya, dukungan finansial dan pelatihan profesional sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan kinerja guru di daerah terpencil (Leon et al., 2023).

Penguatan kapasitas guru melalui pelatihan dan sertifikasi juga merupakan solusi penting. Peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, program pelatihan dan sertifikasi guru harus menjadi bagian integral dari kebijakan pendidikan di Kecamatan Teor. Selain itu, penyediaan fasilitas belajar yang memadai, seperti buku teks, alat peraga, dan akses internet, juga penting untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif. Penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi kualitas

pendidikan di daerah terpencil, termasuk jumlah guru, fasilitas pendidikan, dan dukungan infrastruktur (Guo et al., 2022). Namun, masih terdapat kesenjangan dalam penelitian mengenai efektivitas kebijakan tunjangan khusus dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil seperti Kecamatan Teor. Meskipun tunjangan khusus telah diakui sebagai solusi potensial, implementasinya sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti keterlambatan pencairan dan juga kurangnya dukungan infrastruktur. Selain itu, penelitian mengenai dampak jangka panjang dari kebijakan tunjangan khusus terhadap kualitas pendidikan masih terbatas. Banyak penelitian yang hanya fokus pada dampak jangka pendek, seperti peningkatan motivasi dan kinerja guru, tanpa melihat efek jangka panjang terhadap hasil belajar siswa (Dahri et al., 2022). Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari kebijakan ini, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan efektivitasnya (Gaduh et al., 2020).

Penelitian ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, menganalisis kebijakan yang telah dibuat oleh Dinas Pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SMP Negeri Kecamatan Teor. Kedua, mengevaluasi dampak kebijakan tersebut, termasuk peningkatan kompetensi guru, fasilitas pendidikan, dan hasil belajar siswa. Ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi kebijakan, seperti sumber daya manusia, infrastruktur, dukungan masyarakat, dan tantangan administratif, untuk merumuskan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas kebijakan di masa mendatang. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokusnya yang mendalam terhadap evaluasi jangka panjang dari kebijakan tunjangan khusus dan analisis komprehensif mengenai kondisi spesifik di Kecamatan Teor. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan memberikan gambaran tentang efektivitas kebijakan saat ini, tetapi juga akan menawarkan wawasan yang dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih baik di masa depan.

Ruang lingkup penelitian ini mencakup evaluasi implementasi kebijakan tunjangan khusus, analisis dampak kebijakan terhadap kualitas pendidikan, serta identifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian yang terdiri dari kepala dinas pendidikan, kepala bidang budaya, dan

lima guru PNS di Kecamatan Teor. Data dikumpulkan melalui teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan tujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil.

II. METODE PENELITIAN

Material yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dokumen kebijakan dari Dinas Pendidikan, kuesioner, dan alat perekam untuk wawancara. Dokumen kebijakan ini mencakup peraturan, petunjuk teknis, dan laporan yang berkaitan dengan pemberian tunjangan khusus kepada guru di Kecamatan Teor. Kuesioner dirancang untuk mengumpulkan data dari guru dan pejabat dinas pendidikan, sedangkan alat perekam digunakan untuk merekam wawancara mendalam dengan narasumber. Persiapan sampel melibatkan pemilihan subjek penelitian, yaitu sekretaris Dinas Pendidikan, lima guru PNS penerima tunjangan khusus, dan kepala bidang kebudayaan. Pemilihan ini berdasarkan peran mereka dalam implementasi kebijakan tunjangan khusus. Data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Setiap wawancara dicatat dan dianalisis untuk memastikan akurasi dan relevansi data.

Eksperimen dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Reduksi data dilakukan untuk menyaring informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Pengumpulan data yang diperoleh dari hasil kuesioner, wawancara, dan dokumentasi dicatat secara rinci dalam catatan lapangan yang kemudian dianalisis. Parameter yang diukur dalam penelitian ini meliputi efektivitas kebijakan tunjangan khusus, motivasi guru, kualitas pendidikan, dan hambatan dalam implementasi kebijakan. Data ini dianalisis untuk mengevaluasi dampak kebijakan terhadap kualitas pendidikan di SMP Negeri Kecamatan Teor. Selain itu, aspek lain seperti fasilitas sekolah dan dukungan dari orang tua juga diperhitungkan sebagai variabel penting yang mempengaruhi hasil penelitian.

Analisis dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi untuk menguji kredibilitas data. Triangulasi data mencakup pengumpulan data dari berbagai sumber dan menggunakan berbagai metode pengumpulan data untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Data yang telah dikumpulkan dan

dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang dampak kebijakan tunjangan khusus terhadap kualitas pendidikan di Kecamatan Teor.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Apa Saja Dinas Pendidikan Untuk Meningkatkan Kualitas

Dinas Pendidikan telah mengimplementasikan beberapa kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SMP Negeri Kecamatan Teor. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi:

- a) Pemberian Tunjangan Khusus: Tunjangan ini diberikan kepada guru yang bertugas di daerah terpencil untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
- b) Beasiswa untuk Guru: Beasiswa ini diberikan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, bertujuan meningkatkan kompetensi dan kualifikasi guru.
- c) Pelatihan dan Sertifikasi Guru: Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan mengajar dan profesionalisme guru.
- d) Penyediaan Fasilitas Belajar: Penyediaan buku teks, alat peraga, dan akses internet untuk mendukung proses pembelajaran.
- e) Perbaikan Infrastruktur: Meningkatkan transportasi dan komunikasi untuk memfasilitasi akses ke sekolah dan informasi pendidikan.

Kebijakan pemberian tunjangan khusus bagi guru di daerah terpencil telah terbukti efektif di berbagai daerah lain dalam meningkatkan motivasi dan retensi guru. Literatur menunjukkan bahwa tunjangan ini dapat meningkatkan kesejahteraan guru dan mendorong mereka untuk tetap mengajar di daerah terpencil. Program beasiswa dan pelatihan serta sertifikasi guru sejalan dengan temuan literatur yang menekankan pentingnya peningkatan kompetensi guru untuk kualitas pendidikan yang lebih baik. Peningkatan kompetensi melalui pendidikan lanjutan dan pelatihan berkelanjutan telah terbukti meningkatkan efektivitas pengajaran dan hasil belajar siswa. Namun, implementasi kebijakan ini di Kecamatan Teor menghadapi tantangan. Misalnya, keterlambatan pencairan tunjangan dan kurangnya dukungan infrastruktur seperti transportasi dan komunikasi menghambat efektivitas kebijakan tersebut. Literatur juga menunjukkan bahwa tanpa

dukungan infrastruktur yang memadai, kebijakan tunjangan dan pelatihan tidak akan memberikan hasil yang optimal. Penelitian di Indonesia mengungkapkan bahwa hambatan akses teknologi dan internet selama pandemi COVID-19 telah mengurangi efektivitas kebijakan pendidikan jarak jauh, yang menunjukkan pentingnya infrastruktur yang baik (Cahyadi et al., 2021).

Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dirumuskan oleh Dinas Pendidikan sudah sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SMP Negeri Kecamatan Teor. Namun, implementasinya perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Keterlambatan pencairan tunjangan dan kurangnya infrastruktur mengurangi efektivitas kebijakan tersebut. Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa pengembangan profesional guru melalui program pelatihan yang didukung oleh lembaga filantropi dapat meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil, tetapi membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai untuk mencapai hasil yang optimal (Sutomo & Siregar, 2022). Implikasi dari temuan ini adalah perlunya perbaikan dalam sistem administrasi untuk memastikan pencairan tunjangan tepat waktu dan penyediaan infrastruktur yang memadai. Dukungan tambahan dalam bentuk transportasi yang lebih baik dan akses internet yang stabil akan sangat membantu dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, dukungan komunitas lokal dan adaptasi kebijakan terhadap kebutuhan spesifik daerah sangat penting untuk mencapai keberhasilan yang diinginkan. Dukungan ini telah terbukti efektif dalam studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa konteks lokal memainkan peran kunci dalam keberhasilan kebijakan pendidikan di daerah terpencil di Indonesia (Juharyanto et al., 2023). Dengan demikian, langkah-langkah ini akan membantu mencapai tujuan pendidikan yang lebih tinggi dan berkelanjutan di Kecamatan Teor. Dengan perbaikan dalam implementasi kebijakan, kualitas pendidikan di daerah terpencil seperti Kecamatan Teor dapat ditingkatkan secara signifikan, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada hasil belajar siswa dan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Implementasi kebijakan yang lebih baik akan mendukung guru dalam melaksanakan tugas mereka dengan lebih efektif, sehingga

pendidikan di daerah terpencil dapat mencapai standar yang lebih tinggi.

2. Dampak Kebijakan dari Dinas Pendidikan

Dampak dari kebijakan yang dibuat oleh Dinas Pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di SMP Negeri Kecamatan Teor menunjukkan hasil yang beragam. Kebijakan pemberian tunjangan khusus telah meningkatkan kesejahteraan guru, meskipun implementasinya sering kali terlambat. Program beasiswa untuk guru telah meningkatkan kualifikasi beberapa guru, yang berdampak positif pada kompetensi mereka dalam mengajar. Pelatihan dan sertifikasi guru juga telah meningkatkan keterampilan mengajar dan profesionalisme guru, meskipun tidak semua guru mendapatkan kesempatan yang sama. Penyediaan fasilitas belajar, seperti buku teks dan akses internet, telah membantu dalam proses pembelajaran, meskipun akses internet masih belum merata di seluruh kecamatan. Perbaikan infrastruktur transportasi dan komunikasi masih menghadapi kendala signifikan, yang membatasi mobilitas dan aksesibilitas sumber belajar.

Dampak positif dari kebijakan pemberian tunjangan khusus dan beasiswa bagi guru di daerah terpencil telah didokumentasikan dengan baik. Kebijakan ini umumnya meningkatkan kesejahteraan dan motivasi guru, yang pada gilirannya meningkatkan retensi dan kinerja mereka. Di Kecamatan Teor, tunjangan khusus dan beasiswa telah memberikan manfaat serupa, meskipun dampaknya tidak sebesar yang diharapkan karena kendala dalam implementasi. Misalnya, keterlambatan pencairan tunjangan mengurangi motivasi guru, yang berlawanan dengan temuan literatur yang menunjukkan bahwa tunjangan yang tepat waktu sangat penting untuk kesejahteraan guru (Chirimana et al., 2023).

Pelatihan dan sertifikasi guru juga menunjukkan dampak positif dalam literatur, di mana peningkatan kompetensi guru melalui program pelatihan berkelanjutan telah terbukti meningkatkan efektivitas pengajaran. Di Kecamatan Teor, meskipun pelatihan dan sertifikasi telah meningkatkan keterampilan mengajar beberapa guru, keterbatasan dalam akses dan frekuensi pelatihan mengurangi potensi dampaknya (Young et al., 2018). Penyediaan fasilitas belajar dan perbaikan infrastruktur, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan, masih belum

optimal karena masalah distribusi dan keterbatasan sumber daya, yang berbeda dari kasus sukses di daerah lain yang memiliki dukungan infrastruktur yang lebih baik (Asim et al., 2017).

Temuan ini menyoroti pentingnya implementasi yang efektif dari kebijakan pendidikan untuk mencapai dampak yang diinginkan. Kebijakan pemberian tunjangan khusus dan beasiswa bagi guru memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi guru, tetapi kendala dalam pencairan dan akses perlu diatasi untuk memaksimalkan manfaatnya. Perbaikan dalam sistem administrasi dan pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan tunjangan dan beasiswa diterima tepat waktu dan merata. Misalnya, penelitian di daerah terpencil di India menunjukkan bahwa kualitas pendidikan berkorelasi negatif dengan jarak sekolah dari pusat perkotaan, yang juga dipengaruhi oleh migrasi guru dan keinginan untuk migrasi (Mitra et al., 2008).

Selain itu, pelatihan dan sertifikasi guru perlu diperluas agar lebih banyak guru dapat meningkatkan keterampilan mereka. Program pelatihan harus dirancang agar lebih inklusif dan mudah diakses oleh semua guru, terutama mereka yang berada di daerah terpencil. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi guru melalui program pelatihan berkelanjutan telah terbukti meningkatkan efektivitas pengajaran dan hasil belajar siswa. Namun, keterbatasan dalam akses dan frekuensi pelatihan sering kali mengurangi potensi dampaknya. Studi tentang vitalisasi pendidikan di daerah terpencil di China menyoroti pentingnya strategi jangka panjang dan mekanisme efektif untuk meningkatkan pendidikan di daerah pedesaan (MacMath et al., 2010).

Lebih jauh lagi, penyediaan fasilitas belajar dan perbaikan infrastruktur harus menjadi prioritas untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif. Dukungan tambahan seperti akses internet yang stabil dan transportasi yang memadai sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil. Misalnya, penelitian di Australia menunjukkan bahwa konteks lokal sangat penting dalam penerapan kebijakan pendidikan untuk mengatasi ketidakadilan geografis dan meningkatkan hasil pendidikan di sekolah-sekolah terpencil (Herbert, 2020). Dengan memperbaiki implementasi kebijakan

dan mengatasi kendala yang ada, dampak positif dari kebijakan pendidikan dapat ditingkatkan. Hal ini akan berdampak signifikan pada kualitas pendidikan di daerah terpencil, yang pada akhirnya akan meningkatkan hasil belajar siswa dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Implementasi kebijakan yang lebih baik akan mendukung guru dan siswa dalam mencapai potensi penuh mereka, sehingga menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik dan berkelanjutan.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengimplementasian Kebijakan

Dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan di SMP Negeri Kecamatan Teor, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut.

Faktor Pendukung:

- a) **Komitmen Dinas Pendidikan:** Dinas Pendidikan menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai kebijakan seperti tunjangan khusus, beasiswa, dan pelatihan guru.
- b) **Dukungan Masyarakat:** Masyarakat di Kecamatan Teor menunjukkan dukungan yang baik terhadap kebijakan pendidikan, dengan partisipasi aktif dalam kegiatan sekolah dan upaya peningkatan kualitas pendidikan.
- c) **Sumber Daya Manusia (SDM):** Meskipun jumlahnya terbatas, ada guru-guru yang berkompeten dan berdedikasi tinggi yang mendukung pelaksanaan kebijakan dengan baik.

Faktor Penghambat:

- a) **Keterbatasan Infrastruktur:** Infrastruktur yang tidak memadai, seperti akses transportasi yang sulit dan jaringan internet yang tidak stabil, menghambat pelaksanaan kebijakan secara efektif.
- b) **Keterlambatan Administrasi:** Proses administrasi yang lambat, terutama dalam pencairan tunjangan dan distribusi beasiswa, mengurangi motivasi guru dan efektivitas kebijakan.
- c) **Minimnya Pelatihan dan Pengembangan:** Kesempatan pelatihan dan pengembangan yang terbatas bagi guru mengurangi dampak positif dari kebijakan pelatihan dan sertifikasi.

Dalam literatur, keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan sering kali didukung

oleh infrastruktur yang baik, administrasi yang efisien, dan kesempatan pelatihan yang memadai. Di Kecamatan Teor, meskipun ada komitmen dan dukungan dari dinas pendidikan dan masyarakat, keterbatasan infrastruktur menjadi penghambat utama. Studi menunjukkan bahwa infrastruktur yang memadai, seperti akses internet yang stabil dan transportasi yang lancar, sangat penting untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pendidikan. Misalnya, penelitian di daerah terpencil di Hainan Province, China, menunjukkan bahwa kurangnya infrastruktur dasar seperti ruang kelas dan alat bantu mengajar menghambat efektivitas kebijakan pendidikan (Chen & Yang, 2019). Proses administrasi yang efisien juga sangat penting, seperti yang ditunjukkan dalam berbagai studi kasus keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan di daerah lain. Di Kecamatan Teor, keterlambatan administrasi menghambat pencairan tunjangan dan distribusi beasiswa, yang berlawanan dengan temuan literatur yang menekankan pentingnya kecepatan dan keakuratan administrasi. Penelitian di Ghana menyoroti bahwa faktor administratif dan teknologi memiliki korelasi positif yang kuat dengan keberhasilan implementasi kebijakan Pendidikan (Ohene, 2023). Oleh karena itu, perbaikan dalam sistem administrasi dan pengawasan yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan tunjangan dan beasiswa diterima tepat waktu dan merata. Selain itu, literatur menunjukkan bahwa pelatihan dan pengembangan berkelanjutan untuk guru sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Di Kecamatan Teor, kesempatan pelatihan yang terbatas mengurangi potensi dampak kebijakan pelatihan dan sertifikasi guru. Studi sebelumnya menegaskan pentingnya pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan untuk mendukung pengembangan profesional guru. Sebagai contoh, penelitian di Australia menunjukkan bahwa faktor kontekstual seperti dukungan komunitas dan adaptasi kebijakan terhadap kebutuhan lokal memainkan peran penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan pendidikan di daerah terpencil (Herbert, 2020). Dengan memperbaiki implementasi kebijakan dan mengatasi kendala yang ada, dampak positif dari kebijakan pendidikan dapat ditingkatkan, sehingga meningkatkan hasil belajar siswa dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Temuan ini menyoroti pentingnya faktor pendukung dan penghambat dalam keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan. Faktor pendukung seperti komitmen dinas pendidikan, dukungan masyarakat, dan SDM yang berkompeten sangat penting untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Sebuah penelitian di Serbia menunjukkan bahwa meskipun tidak semua elemen implementasi harus sempurna, komitmen dan keterlibatan aktor sangat penting untuk kemajuan kebijakan pendidikan (Caves & Oswald-Egg, 2023). Dukungan komunitas dan adaptasi kebijakan terhadap kebutuhan spesifik daerah tersebut memainkan peran kunci dalam keberhasilan kebijakan. Namun, untuk mencapai hasil yang optimal, perlu ada upaya untuk mengatasi faktor penghambat yang ada. Perbaikan infrastruktur, seperti peningkatan akses transportasi dan jaringan internet, sangat penting untuk dapat mendukung pelaksanaan kebijakan. Infrastruktur yang memadai akan memfasilitasi aksesibilitas sumber belajar dan mobilitas guru, sehingga meningkatkan efektivitas kebijakan pendidikan. Penelitian di India menemukan bahwa kualitas pendidikan berkorelasi negatif dengan jarak sekolah dari pusat perkotaan, menunjukkan pentingnya infrastruktur yang baik untuk mengurangi hambatan geografis (Mitra et al., 2008). Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur harus menjadi prioritas utama untuk mendukung implementasi kebijakan yang efektif. Selain itu, perlu ada perbaikan dalam proses administrasi untuk memastikan pencairan tunjangan dan distribusi beasiswa tepat waktu dan efisien. Administrasi yang lebih cepat dan akurat akan meningkatkan motivasi guru dan efektivitas kebijakan secara keseluruhan.

Penelitian di Ghana menunjukkan bahwa faktor administratif dan teknologi memiliki korelasi positif yang kuat dengan keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan (Ohene, 2023). Dengan memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan yang lebih ketat, serta memastikan tunjangan dan beasiswa diterima tepat waktu, kebijakan pendidikan dapat berjalan lebih lancar dan efektif, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Teor. Kesempatan pelatihan dan pengembangan bagi guru juga perlu ditingkatkan. Program pelatihan yang lebih inklusif dan berkelanjutan akan membantu

meningkatkan kompetensi guru dan kualitas pengajaran di kelas. Penelitian menunjukkan bahwa pengembangan profesional guru melalui program pelatihan yang didukung oleh lembaga filantropi dapat memberikan hasil yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil (Sutomo & Siregar, 2022). Dengan memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan yang lebih ketat, serta memastikan tunjangan dan beasiswa diterima tepat waktu, kebijakan pendidikan dapat berjalan lebih lancar dan efektif. Hal ini akan berdampak positif pada hasil belajar siswa dan kualitas pendidikan di Kecamatan Teor secara keseluruhan. Dengan mengatasi faktor penghambat dan memaksimalkan faktor pendukung, kebijakan pendidikan di Kecamatan Teor dapat diimplementasikan dengan lebih efektif. Implementasi kebijakan yang lebih baik akan membantu mencapai tujuan pendidikan yang lebih tinggi dan berkelanjutan di daerah terpencil seperti Kecamatan Teor.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan temuan penelitian, beberapa poin penting dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas Kebijakan Tunjangan Khusus dan Beasiswa: Kebijakan tunjangan khusus telah terbukti meningkatkan kesejahteraan dan motivasi guru di Kecamatan Teor, meskipun efektivitasnya terkendala oleh keterlambatan administrasi dan infrastruktur yang tidak memadai. Program beasiswa dan pelatihan juga menunjukkan peningkatan kompetensi guru, meskipun akses terhadap program-program ini masih terbatas.
2. Kendala Infrastruktur dan Administrasi: Implementasi kebijakan pendidikan di Kecamatan Teor dihadapkan pada kendala signifikan, seperti keterbatasan infrastruktur dan keterlambatan dalam proses administrasi. Kurangnya fasilitas transportasi yang memadai dan akses internet yang stabil menghambat pelaksanaan kebijakan secara efektif, yang berdampak negatif pada hasil pendidikan.

Dukungan Komunitas dan Adaptasi Kebijakan: Dukungan dari komunitas lokal dan adaptasi kebijakan terhadap kebutuhan spesifik daerah sangat penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan. Komitmen dari Dinas Pendidikan, serta

partisipasi aktif masyarakat dan sumber daya manusia yang berkompeten, merupakan faktor pendukung utama yang dapat membantu mengatasi kendala dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kecamatan Teor.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Analisis Kebijakan Dinas Pendidikan Tentang Tunjangan Khusus dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Asim, S., Chimombo, J., Chugunov, D., & Gera, R. (2017). *Moving Teachers to Malawi's Remote Communities: A Data-Driven Approach to Teacher Deployment*. World Bank, Washington, DC. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-8253>
- Cahyadi, A., Hendryadi, Widyastuti, S., Mufidah, V. N., & Achmadi. (2021). Emergency remote teaching evaluation of the higher education in Indonesia. *Heliyon*, 7(8), e07788–e07788. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07788>
- Caves, K. M., & Oswald-Egg, M. E. (2023). An Empirical Case of Education Policy Implementation in Serbian VET. *International Journal for Research in Vocational Education and Training*, 10(2), 191–219. <https://doi.org/10.13152/ijrvet.10.2.3>
- Chen, C.-H., & Yang, Y.-C. (2019). Revisiting the effects of project-based learning on students' academic achievement: A meta-analysis investigating moderators. *Educational Research Review*, 26, 71–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.edurev.2018.11.001>
- Chirimbana, M., Kashweka, E., & Amunime, S. (2023). Assessing the Effectiveness of the Remoteness and Hardship Allowance on Teacher Retention in Oshana Region in Namibia Rural Schools: Teachers Views. *Open Journal of Social Sciences*, 11(08), 383–397. <https://doi.org/10.4236/jss.2023.118027>
- Dahri, N. A., Vighio, M. S., Alismaiel, O. A., & Al-Rahmi, W. M. (2022). Assessing the Impact of Mobile-Based Training on Teachers' Achievement and Usage Attitude. *International Journal of Interactive Mobile Technologies (IJIM)*, 16(09), 107–129. <https://doi.org/10.3991/ijim.v16i09.30519>
- Gaduh, A., Pradhan, M., Priebe, J., & Susanti, D. (2020). *Scores, Camera, Action? Incentivizing Teachers in Remote Areas*. Research on Improving Systems of Education (RISE). <https://doi.org/10.35489/bsg-rise-wp.2020/035>
- Guo, S., Sun, T., Gong, J., Lu, Z., Zhang, L., & Wang, Q. (2022). Remote Co-teaching in Rural Classroom: Current Practices, Impacts, and Challenges. In *CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. ACM. <https://doi.org/10.1145/3491102.3501924>
- Herbert, A. (2020). Contextualising Policy Enactment in Regional, Rural and Remote Australian Schools: A Review of the Literature. *Australian and International Journal of Rural Education*, 30(1), 64–81. <https://doi.org/10.47381/aijre.v30i1.272>
- Juharyanto, J., Arifin, I., Sultoni, S., Adha, M. A., & Qureshi, M. I. (2023). Antecedents of Primary School Quality: The Case of Remote Areas Schools in Indonesia. *SAGE Open*, 13(1), 215824402211449. <https://doi.org/10.1177/21582440221144971>
- Ledger, S., Masinire, A., Angel Díaz Delgado, M., & Burgess, M. (2021). Reframing the policy discourse: A comparative analysis of teacher preparation for rural and remote education in Australia, South Africa and Mexico. *Education Policy Analysis Archives*, 29(January-July), 82. <https://doi.org/10.14507/epaa.29.6233>
- Leon, M. B., Mokamad, R. F., Almirante, J. F., Mandado, A. Y., Barcenal, S. E., Salvadico, J. L., Salendab, R. L. A. O., & Salendab, F. (2023). Sacrifice and Satisfaction: Exploring The Quality of Life of Public Secondary School Volunteer Teachers in Remote Areas. *International Journal of Multidisciplinary: Applied Business and Education Research*, 4(9), 3188–3196.

- <https://doi.org/10.11594/ijmaber.04.09.11>
- MacMath, S., Roberts, J., Wallace, J., & Chi, X. (2010). RESEARCH SECTION: Curriculum integration and at-risk students: a Canadian case study examining student learning and motivation. *British Journal of Special Education*, 37(2), 87-94. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1467-8578.2009.00454.x>
- Mitra, S., Dangwal, R., & Thadani, L. (2008). Effects of remoteness on the quality of education: A case study from North Indian schools. *Australasian Journal of Educational Technology*, 24(2). <https://doi.org/10.14742/ajet.1219>
- Muthanna, A., & Sang, G. (2023). A Conceptual Model of the Factors Affecting Education Policy Implementation. *Education Sciences*, 13(3), 260. <https://doi.org/10.3390/educsci13030260>
- Ohene, N. (2023). An Analysis of Factors Affecting the Successful Implementation of Educational Policies in Developing Countries. *Journal of Education Review Provision*, 1(3), 30-35. <https://doi.org/10.55885/jerp.v1i3.216>
- Sibarani, S., & Sinamo, N. (2020). Implementation of Educational Policy in Indonesia. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v4i14.7900>
- Sutomo, M., & Siregar, E. S. (2022). Teacher Professional Development in Indonesia's Remote Areas with Driven Educational Philanthropic Institutions. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, 6(3), 500-509. <https://doi.org/10.23887/jppp.v6i3.55742>
- Young, K., Grainger, P., & James, D. (2018). Attracting Preservice Teachers to Remote Locations. *Australian Journal of Teacher Education*, 43(2), 157-171. <https://doi.org/10.14221/ajte.2018v43n2.9>